



Perbup Terbit, Belasan Mobdin Dewan Ditarik

Singaraja (Bali Post) -

Sebanyak 12 unit mobil dinas (mobdin) di Sekretariat DPRD Buleleng akan ditarik bulan ini. Penarikan mobdin tersebut menyusul terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) No. 63 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Buleleng.

Mengacu perbup itu, mobdin yang selama ini digunakan oleh Ketua Fraksi, Ketua Komisi, Ketua Badan Kehormatan (BK) dan Ketua Badan Pembentukan Perda (Baperda) ditarik. Setelah penarikan mobdin ini, anggota dewan akan mendapat tunjangan transportasi yang mulai dibayarkan oleh pemerintah. Sementara, mobdin Ketua DPRD dan tiga Wakil Ketua DPRD tidak ditarik.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Buleleng Gede Wisnawa mengatakan, menyusul

terbitnya perbup itu, pihaknya segera mengirim surat tentang penarikan mobdin kepada komisi, fraksi, dan pejabat alat kelengkapan dewan. Dasar surat penarikan itu mengacu pada Perbup No. 63 Tahun 2017 tertanggal 2 Oktober 2017. Selain melayangkan surat, ada dua mobdin sudah diserahkan kepada sekretariat dewan. Dua mobdin itu yakni mobdin Ketua Komisi IV diserahkan oleh ketuanya Gede Wisnawa. Selain itu, Ketua Baperda juga menyerahkan mobdin yang

diterimanya. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan tunjangan transportasi kepada anggota dewan sebesar Rp 11,8 juta tiap bulan. "Kami targetkan dalam bulan ini 12 unit mobdin akan ditarik. Kami akan bersurat dan kalau sudah terkumpul kita serahkan kepada pemerintah daerah. Saat ini Komisi IV dan Ketua Baperda sudah menyerahkan dan karena sudah ditarik, sehingga diserahkan lebih awal," katanya.

Terkait mobdin untuk unsur

pimpinan dewan, Wisnawa mengatakan, mengacu bab II pasal 2 bahwa dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Mengacu pasal ini, pimpinan dan Wakil Ketua DPRD telah diberikan tunjangan perumahan dan kendaraan dinas, sehingga mobdin tidak ditarik. "Karena sudah diatur seperti itu dan memang pimpinan sudah diberikan rumah dan kendaraan dinas, sehingga tidak diberikan lagi tunjangan transportasi seperti anggota dewan," jelasnya.

Sementara itu, Badan Keuangan Daerah (BKD) saat



Bali Post/kmb38
Gede Wisnaya Wisna

ini masih menunggu penarikan mobdin di lingkungan Sekretariat DPRD Buleleng. Mobdin tersebut ini rencananya akan didistribusikan untuk mendukung kegiatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (kmb38)

Edisi : Selasa, 17 Oktober 2017

Hal : 11